

# TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PASAL 35 JUNCTOPASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANGPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI(Studi di PT. Prima Duta Sejati Malang)



Oleh: MUHAMMAD SAHRI ( 06400170 )

Law

Dibuat: 2011-02-02 , dengan 6 file(s).

**Keywords:** TKI, Persyaratan, Penempatan, PJTKI

## ABSTRAKSI

Program penempatan TKI ke luar negeri merupakan upaya untuk menanggulangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan keterampilan dan juga meningkatkan penerimaan devisa bagi negara. Akan tetapi selain manfaat tersebut, berbagai permasalahan dan tindakan diskriminasi terhadap calon TKI/ TKI sebanding dengan manfaatnya, hal tersebut tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan dalam proses perekrutan hingga penempatan TKI oleh PJTKI ke luar negeri.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, kendala-kendalanya dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan sampel/ Responden, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

Dari hasil penelitian ditemukan pelanggaran yang dilakukan PJTKI yaitu mengirim calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan khususnya mengenai latar belakang pendidikan calon TKI yang seharusnya lulusan SLTP, akan tetapi banyak TKI yang dikirim PJTKI hanya lulusan Sekolah Dasar (SD).

Kesimpulannya, pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tidak efektif karena PJTKI menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan dan dokumen kelengkapan TKI khususnya mengenai latar belakang pendidikan TKI hanya berijazah sekolah dasar (SD) yang seharusnya berijazah SLTP. Saran, revisi pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri karena diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## ABSTRACT

Migrant worker placement programs is an effort to tackle unemployment, improve family welfare, enhance skills and also increase foreign exchange earnings for the country. However, many issues and discriminatory action against the prospective migrant worker is proportional to the benefits, so this is not free from irregularities in the recruitment process until the placement

of migrant workers by the recruitment agents.

Issues raised in this research was the effectiveness of Article 35 Jo. Article 51 of Act 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Overseas Indonesian Workers, constraints and its efforts in addressing the problem.

This study uses sociological juridical approach, data collection techniques in the form of interviews with respondents, observation, documentation and study of related literature toward the research problem.

From the research found violations committed by the agencies in sending prospective workers who do not meet the requirements, especially regarding educational background. For example, candidates should have sent workers who graduated from high school, but many workers who have been sent only completed primary school.

In conclusion, article 35 Jo. Article 51 of Act 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad was ineffective because the recruitment agency place workers who are not qualified and the fraud on document of migrant workers, especially regarding educational background. The writer suggests that Article 35 Jo. Article 51 of Act 39 of 2004 regarding the placement and protection of Indonesian workers overseas as discriminatory should be revised and this contrasts with the the 1945 Constitution.

Keywords: Migrant Workers, Requirements, Placements, Recruitment Agency